

## ABSTRAKS

**Dewi Siti Angraeni (1158010066) Pengaruh Implementasi Kebijakan Tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2017.**

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib dan taat pada peraturan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Hal ini juga didukung oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 258/PMK.02/2015 yang diharapkan agar serapan anggaran paling sedikit menyerap 95% sehingga pengelolaan keuangan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Peraturan tersebut diterapkan dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung. Namun, selama dalam pelaksanaan kebijakan tersebut tidak dapat terhindarkan ketidaksesuaian antara serapan anggaran dengan anggaran yang telah ditetapkan yakni kurang dari 95%, bahkan ada beberapa program atau kegiatan yang tidak terlaksana. Sehingga dari adanya program yang tidak terlaksana tersebut mengakibatkan akuntabilitas publik pada Dinas Pendidikan Kota Bandung tidak berjalan secara optimal. Maka perlu bagi Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk memperhatikan implementasi kebijakan pelaksanaan anggaran belanja agar akuntabilitas publik dapat berjalan dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh standar dan sasaran kebijakan; sumber daya; komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; karakteristik agen pelaksana; kondisi sosial, ekonomi dan politik; dan disposisi implementor dalam implementasi kebijakan tentang pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/ lembaga terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2017.

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu implementasi kebijakan sebagai variabel independen (X) dan akuntabilitas publik sebagai variabel dependen (Y). Untuk variabel implementasi kebijakan peneliti menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn. Sedangkan, untuk variabel akuntabilitas publik peneliti menggunakan teori Mardiasmo. Disandingkan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 258/PMK.02/2015 tentang pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/lembaga.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, observasi dan penyebaran kuesioner langsung kepada responden yang berjumlah 30 orang serta menggunakan teknik sampling jenuh. Teknik analisis data yang digunakan adalah koefisien determinasi, analisis regresi linier sederhana, analisis regresi linier berganda, analisis uji parsial (uji-t), analisis uji simultan (uji-f), dan koefisien korelasi dengan program SPSS 20.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa standar dan sasaran kebijakan berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas publik dengan nilai  $t_{hitung}$  (3.537) >  $t_{tabel}$  (2.048). Sedangkan sumber daya berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas publik, dengan nilai  $t_{hitung}$  (2.459) >  $t_{tabel}$  (2.048). Selanjutnya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas publik dengan nilai  $t_{hitung}$  (5.382) >  $t_{tabel}$  (2.048). kemudian, karakteristik agen pelaksana berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas publik dengan nilai  $t_{hitung}$  (2.966) >  $t_{tabel}$  (2.048). Selanjutnya, kondisi sosial, ekonomi, dan politik berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas publik dengan nilai  $t_{hitung}$  (3.579) >  $t_{tabel}$  (2.048). sedangkan disposisi implementor berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas publik dengan nilai  $t_{hitung}$  (2.536) >  $t_{tabel}$  (2.048). Adapun keenam dimensi mengenai implementasi kebijakan tersebut memperoleh  $R^2$  (*R Square*) sebesar 0,69,1% (tinggi), sedangkan sisanya sebesar 30,9% dipengaruhi atau dijelaskan variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.

**Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Serapan Anggaran, Akuntabilitas Publik.**

## ABSTRACTS

**Dewi Siti Angraeni (1158010066) *Influence of policy implementation on implementation of budget of Ministry of State/Institutions on public accountability at Bandung City Education Office year 2017.***

*Law number 33 of 2004 in order to realize good Governance is the government's effort to realize the financial management that is orderly and obedient to the regulations as a form of government responsibility to the community. It is also supported by the Ministerial regulation of the Minister of Finance No. 258/PMK. 02/2015 which is expected to be absorbed at least 95% in order to run the financial management effectively and efficiently. The regulations were implemented and implemented by the Education Office of Bandung. However, during the implementation of the policy, it is inevitable that the discrepancy between the budget absorption and the budget that has been determined is less than 95%, even some programs or activities that are not carried out. Thus, from the absence of such programs resulted in public accountability in the education office of Bandung not running optimally. It is necessary for the Bandung Education Office to observe the implementation of the budget implementation policy so that public accountability can run well.*

*The study aims to know how much influence the standards and objectives of the policy are; resources; Communication between organizations and strengthening activities; Characteristics of implementing agents; Social, economic and political conditions; and disposition of the implementation in the implementation of the policy on the implementation of the budget of the Ministry of State/Institutions on public accountability to the Education Office of Bandung year 2017.*

*The study consists of two variables, namely the implementation of the policy as an independent variable (X) and public accountability as the dependent variable (Y). For a variable policy implementation researchers use the theory of Van Meter and Van Horn. Whereas, for the variables of public accountability researchers use the theory Mardiasmo. It is paired with the Ministry of Finance regulation No. 258/PMK. 02/2015 concerning the awarding of awards and the imposition of sanctions on the execution of the budget of the Ministry of State/institution.*

*The methods in this study use quantitative methods with an associative approach. The data collection techniques used are library studies, observations and dissemination of questionnaires directly to respondents of 30 people and using saturated sampling techniques. The data analysis techniques used are coefficient of determination, simple linear regression analysis, multiple linear regression analysis, partial test analysis (test-t), simultaneous test analysis (test-f), and correlation coefficient with SPSS 20 program.*

*The results concluded that policy standards and objectives partially affect public accountability with a value of  $T_{hitung}$  (3,537) >  $T_{tabel}$  (2,048). While the resource has a partial influence on public accountability, with the value of  $T_{hitung}$  (2,459) >  $T_{tabel}$  (2,048). Furthermore, communication between organizations and strengthening of activities is partially influential in public accountability with the value of  $T_{hitung}$  (5,382) >  $T_{tabel}$  (2,048). Then, the characteristics of the implementing agent have a partial influence on public accountability with a value of  $T_{hitung}$  (2,966) >  $T_{tabel}$  (2,048). Further, social, economic, and political conditions have a partial influence on public accountability with a value of  $T_{hitung}$  (3,579) >  $T_{tabel}$  (2,048). Whereas the implementor disposition is of partial effect on public accountability with a value of  $T_{hitung}$  (2,536) >  $T_{tabel}$  (2,048). The six dimensions of the policy implementation derive  $R^2$  (R Square) by 0 69.1% (high), while the remaining 30.9% is influenced or described by other variables not researched by the researcher.*

**Keywords:** *policy implementation, budget removals, public accountability.*